

LALU LINTAS - JALAN - DAMPAK - ANALISIS

PERDAPROV. NTT NO.8, LD 2018/NO.008. TLD NO. 0096

2018

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS UNTUK JALAN PROVINSI DI NUSA TENGGARA TIMUR

Abstrak : - Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Sesuai Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi berwenang memberikan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Provinsi, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1955, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 34 Tahun 2006, PP No. 32 Tahun 2011, PERMENHUB No. 75 Tahun 2015 dan PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menetapkan batasan pengertian yang digunakan dalam pengaturannya. Pengaturan dimaksudkan untuk memberikan arah dan landasan yuridis dalam penyelenggaraan analisis dampak lalulintas di jalan Provinsi dengan tujuan mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, lancar, tertib dan teratur serta menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian. Diatur tentang Azas, Maksud, Tujuan, Ruang lingkup, ANDALALIN, Penyusunan Dokumen ANDALALIN, Penilaian Dokumen Hasil ANDALALIN, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif dan Pendanaan.

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Juli 2018  
- Pada saat peraturan daerah mulai berlaku, maka semua bangunan, permukiman dan infrastruktur wajib andalalin, yang telah ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini paling lama 2 (dua) tahun.  
- Penjelasan : 5 hlm